

ABSTRACT

Global warming as one of the environmental issues to encourage the countries in the world to find the best solution that can provide a good guarantee for the environment through a variety of programs to combat climate change through the *United Nations Framework Convention on Climate Change* in 1992, one of these programs is *Reduccion Emission Deforestation And Forest Degradation Plus (+)* as a program that adheres to the principles sustainable Development in tackling the problem. Socio-cultural aspects is one of the indicators that must be met in the use of these principles to be implemented in the REDD + program. *Conference of Parties (COP) to 16* in Cancun has been mandated to implementing REDD + countries to respect indigenous peoples and their rights are didopsi by the UN based on the *United Nations Declaration on Rights Indegenious People 2007*.

Issues raised this thesis is the role of indigenous peoples through indigenous peoples' rights in REDD + program as the implementation of the UNFCCC and national regulation role of communities in REDD + in Indonesia. The approach used to address problems of the normative juridical approach, this study uses data obtained from secondary data in an effort to obtain objective data with secondary data, the writers do library research, qualitative data analysis performed by descriptive analysis method.

The results of the research in this thesis is based on meeting Confrence of Parties to the UNFCCC to 16 in Cancun Mexico in the annex to paragraph 2 letter c that in giving the role of indigenous peoples in the REDD + program must first give respect for the rights of indigenous peoples refer to the UNDRIP as an indicator relevant in the program. In this case there are some rights such as the Right to Self-Determination , Land and Resources, Participation Right Decision, Right to Free, Prior, Informed Consent, and Approval (*Free, Prior and Informed Consent*), Right over the value of Indigenous Forest Management, Rights Benefit Sharing while setting nationally with regard to the role of indigenous peoples in the implementation of REDD + in Indonesia referring to Article 18B (2) and Article 28 paragraph (3) of the 1945 Constitution, in early implementation Indonesia's REDD + implemented through several Forestry Ministerial Regulation governing technically Indonesian REDD + in the regulation did not set about the role of indigenous peoples. Role of Indigenous Peoples in the REDD + program experiencing dynamic growth in the National REDD + Strategy document Indonesia referenced in the implementation of REDD + in Indonesia.

Keywords: REDD +, Indigenous Peoples, Participation

ABSTRAK

Pemanasan Global sebagai salah satu permasalahan lingkungan mendorong negara-negara di dunia untuk mencari solusi terbaik yang dapat memberikan jaminan atas lingkungan yang baik melalui berbagai program penanggulangan perubahan iklim melalui *United Nation Framework Climate Change Convention 1992*, salah satu program tersebut adalah *Reduccion Emission Deforestation And Forest Degradation Plus (+)* sebagai program yang menganut prinsip *Sustainable Development* dalam penanggulangan masalah tersebut. Aspek sosial budaya merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam penggunaan prinsip tersebut yang akan diimplementasikan dalam program REDD+. *Conference of Parties (COP)* ke 16 di Cancun telah mengamanatkan kepada negara pelaksana REDD+ untuk menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya yang didopsi oleh PBB berdasarkan *United Nation Declaration on Rights Indegenious People 2007*.

Permasalahan yang diangkat skripsi ini yaitu peran masyarakat adat melalui hak-hak masyarakat adat dalam program REDD+ sebagai implementasi UNFCCC serta pengaturan secara nasional peran masyarakat dalam program REDD+ di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yaitu pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder sebagai usaha untuk mendapatkan data yang objektif dengan data sekunder tersebut penulis melakukan studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu berdasarkan pertemuan *Confrence of Parties UNFCCC* ke 16 di Cancun Meksiko dalam lampiran paragraf 2 huruf c bahwa dalam memberikan peran bagi masyarakat adat dalam program REDD+ haruslah terlebih dahulu memberikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang merujuk kepada UNDRIP sebagai indikator yang relevan dalam program tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa Hak seperti Hak Atas Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*), Hak Atas Tanah dan Sumber Daya, Hak Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan, Hak Atas Bebas, Didahulukan, Diinformasikan, Dan Persetujuan (*Free, Prior and Informed Consent*), Hak Atas Nilai Adat dalam Pengelolaan Hutan, Hak Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing*) sedangkan pengaturan secara nasional berkaitan dengan peranan masyarakat adat dalam pelaksanaan program REDD+ di Indonesia mengacu pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, pada awal pelaksanaan REDD+ Indonesia di laksanakan melalui beberapa Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur secara teknis REDD+ Indonesia didalam peraturan tersebut tidak mengatur perihal peranan masyarakat adat. Peranan Masyarakat Adat dalam program REDD+ mengalami perkembangan yang dinamis dalam dokumen Strategi Nasional REDD+ Indonesia yang dijadikan acuan dalam implementasi REDD+ di Indonesia.

Kata Kunci: REDD+, Masyarakat Adat, Partisipasi